

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA RANTE MARIO, KECAMATAN TOMONI,
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Diajukan Oleh:

Masni

4518012122



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Masni

Stambuk/NIM : 4518012122

Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Program Studi : Manajemen

Tempat Penelitian : Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

Telah Disetujui:

Pembimbing I

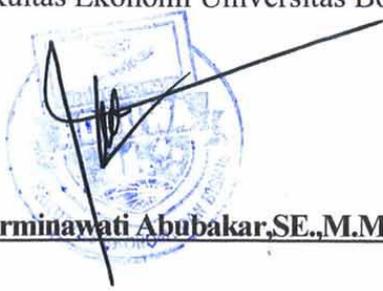
Pembimbing II

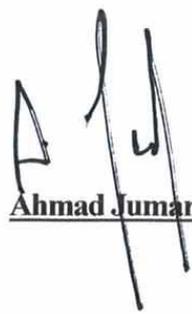

Dr. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si


Dr. Seri Suriani, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Ketua Program Studi Manajemen


Dr. Hj Herminawati Abubakar, SE., M.M., CSBA


Ahmad Jumarding SE., MM

Tanggal Pengesahan

PERYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masni

Nim : 4518012122

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajuhkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 2022

Yang menyatakan,


Masni



ABSTRAK

MASNI. 2022.Skripsi. Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh Muhammad Yusuf Saleh dan Seri Suriani

Kapasitas dari SDM dalam hal ini aparatur desa sangat menentukan kinerja pengelolaan dana desa. Sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterapkan diseluruh Indonesia terkait kualitas aparatur yang kompeten dalam mengelola dana desa. Sehingga pemerintah desa memiliki kinerja yang berbeda-beda dalam mengelola dana desa. Ada tidaknya pengawasan dalam hal ini sistem pengendalian internal juga akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.

Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Sampel yang digunakan sebanyak 50 orang yang tergabung aparatur pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Rante Mario.

Berdasarkan hasil analisis Secara parsial akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa proses penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan di desa Rante Mario.

Kata Kunci : *Good Governance*, Dana Desa.

ABSTRACT

MASNI. 2022.Thesis. The Effect of Good Governance on the Management of Fund Allocation in Rante Mario Village, Tomoni District, Luwu Regency. Supervised by Muhammad Yusuf Saleh and Seri Suriani

The capacity of human resources, in this case the village apparatus, will determine the performance of village fund management. Until now there is no standard that can be applied throughout Indonesia regarding the quality of competent apparatus in managing village funds. So that village governments have different performances in managing village funds. The absence of supervision in this case the internal control system will also increase its influence on the performance of village officials. The purpose of this study was to determine the effect of accountability, transparency and participation on the management of the allocation of funds in Rante Mario Village.

Analysis of the data used in this study is validity test, reliability test, classical assumption, multiple regression analysis, coefficient of determination test and hypothesis testing. The sample used is 50 people who are members of the village government apparatus and the Rante Mario Village Community.

Based on the partial analysis, accountability, transparency and participation have a positive and significant impact on the management of village fund allocations. This illustrates that the budgeting and reporting processes in managing village fund allocations are actually reported and intended for interested parties in Rante Mario village.

Keywords: Good Governance, Village Fund.

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta ilmu dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul **“PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA RANTE MARIO, KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam menjalani pendidikan maupun dalam proses pembuatan proposal skripsi terkhusus kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan, dan akal yang sehat. Sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan kondisi yang baik.
2. Orang tua penulis yaitu Santo Sanda dan juga Mariani yang selalu memberikan dukungan dan do'a, selalu sabar dalam menghadapi kondisi apapun dalam membimbing dan memberikan saran masukan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya selaku Rektor Universitas Bosowa
4. Ibu Dr. Hj . Herminawati.,SE.,M.M _selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bosowa
5. Bapak Ahmad Jumarding SE.,MM _selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bosowa.
6. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Saleh,SE., M.SI dan Ibu Dr. Seri Suriani, SE.,M.Si Sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk

membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis.

7. Terima kasih kepada orang-orang terdekat saya semasa kuliah hingga sampai ditahap penyelesaian tugas akhir pindan, Erika, Tirsa, Pidela, Lipa, Kristin, Septi, yang telah memberikan dukungan, masukan, semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang begitu banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!. (Yeremia 17:7)

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritikan dan saran yang membangun. Sehingga nantinya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan serta bisa dikembangkan lebih lanjut lagi.

Makassar, 2022

Penulis

Masni

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINAL SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Pokok	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Good Governance	9
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	17
2.1.3 Dana Desa	18
2.2 Kerangka Berpikir	211
2.3 Model Penelitian	22
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.5 Definisi Operasional	32

3.6 Jadwal Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.2 Analisis Karakteristik Responden	39
4.3 Hasil Analisis Data	40
4.4 Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Model Penelitian	23
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	36
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3	Karakteristik Reesponden Berdasarkan Pendidikan	40
Tabel 4.4	Uji Validitas	41
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.6	Uji Normalitas.....	44
Tabel 4.7	Uji Regresi Berganda	44
Tabel 4.8	Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.9	Uji Parsial T	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Mario.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan pada daerahnya (Desentralisasi). Demikian halnya dengan desa, bahwa Pemerintah Desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004:3). Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN). *Good*

governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk itu prinsip – prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti good governance maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggung jawaban akan segala aktivitasnya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Sedamaryanti (2009:73) Istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dengan demikian maka birokrasi pemerintah sudah semestinya memiliki peran yang strategis untuk melakukan Praktik good governance sehingga dapat dikembangkan dalam kehidupan birokrasi pemerintah, dan berbagai pelatihan pun perlu dirancang sedemikian rupa agar para pegawai dan pejabat birokrasi dapat memahami nilai dan tradisi baru yang akan dikembangkan dalam birokrasi.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa juga dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa

mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN.

UU memberikan amanat dan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana yang tidak kecil dengan harapan agar dapat dilakukan percepatan pembangunan dengan mengandalkan potensi-potensi lokal setempat (Atiq, 2018:8). Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain (Rustiarini, 2016:43). Pendapatan desa yang besar dari beberapa sumber tersebut harus dikelola secara benar dan transparan, untuk itu aparatur desa sebagai aktor dari pengelolaan dana desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara dan tata kelola keuangan. Dalam UU desa dan peraturan terkait lainnya tegas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin (Soleh, et al., 2016:13). Pengelolaan

dana desa yang baik adalah cerminan pelaksanaan Good Governance pada organisasi desa tersebut.

Ditahun 2020, Sebanyak 124 Desa di Kabupaten Luwu Timur akan menerima Dana Desa (DD) dengan total keseluruhan Dana senilai Rp.116 Miliar, yang dialokasikan melalui APBN kementerian keuangan RI sebagai upaya untuk mendukung pengembangan potensi desa yang selama ini terkendala faktor pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020. Dana Desa harus dimanfaatkan dan di gunakan untuk kepentingan Desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta di lengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak pertamakali berlakunya program dana desa tahun 2015 nyatanya belum sepenuhnya desa berhasil memanfaatkan dana desa dengan baik, salah satunya hasil observasi Pada Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Masyarakat setempat menilai pemberdayaan yang dilakukan aparatur desa masih kurang dan potensi desa tidak termanfaatkan dengan baik, kemajuan desa tidak terlalu signifikan antara sebelum dan setelah adanya program dana desa. Masyarakat setempat juga mengaku pengelolaan dana desa belum transparan terlihat dengan tidak adanya upaya yang membuat masyarakat bisa memnatau langsung kinerja dari pemerintah desa. Pihak pemerintah desa mengaku sebenarnya telah melakukan system pemerintahan yang trasparan hanya memang sifatnya masih manual dengan laporan-laporan

tertulis, tidak seperti pemerintahan lain yang telah banyak memanfaatkan media digital dalam mewujudkan transparansi.

Kapasitas dari SDM dalam hal ini aparatur desa sangat menentukan kinerja pengelolaan dana desa (Munti dan Fahlevi, 2017:8). Sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterapkan diseluruh Indonesia terkait kualitas aparatur yang kompeten dalam mengelola dana desa. Sehingga pemerintah desa memiliki kinerja yang berbeda-beda dalam mengelola dana desa. Ada tidaknya pengawasan dalam hal ini sistem pengendalian internal juga akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa (Tarjono, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur”**

1.2.Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut.

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario ?
3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario ?

4. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
4. Untuk mengetahui variable yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - 1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama kuliah serta mengimplekasikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - 2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi literatur bagi penelitian selanjutnya atau pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa Rante Mario agar lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir 2014:17).

Menurut Duadji (2012:45) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, *outcome*, dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan

dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global. Tata kelola adminitrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik *good government* dan *clean governance* merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat.

Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah pada skateholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawabn pemerintah daerah, maka laporan keuangan daerah juga harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku editor eksternal (Adisetiawan, 2013:7).

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efesiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

a. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip *good governance* juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. 2012: 12). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan di negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Walge demokrasi hanya akan memiliki arti ketika masyarakat atau warga negara sebagai Stakeholders utama selalu dilibatkan dalam proses pembuatan semua jenis kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah (Dwiyanto, 2017:189).

Cohen dan Uphoff Membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapa. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud dalamk perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karna inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dapa partisipasi masyarakat pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.

- c. Tahap penikmatan hasil, yang dapat di jadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya (Tumbel: 2015: 3).

Agar sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Moynihan, Wilcox dalam Hasan (2019:3) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu (1) pemberian informasi (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama, dan (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat.

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat yang sudah dipaparkan diatas maka dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengkaji permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Selain dari pada itu poin-poin yang dipaparkan tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dan kegagalan dalam hal partisipasi masyarakat di desa yang sedang dikaji oleh peneliti.

2) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003:8).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010:9).

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan , dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Kristianten (2006:17) mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator , antara lain :

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
 - b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
 - c) Keterbukaan proses
 - d) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran
- 3) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah,, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya

tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Good governance yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam kinerjanya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian secara sederhana akuntabilitas dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu langkah pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Subroto yang menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam

menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban. (Lestari, 2020: 20).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara menyeluruh, akuntabilitas bersifat mengikat dan merupakan tindakan yang wajib bagi suatu organisasi atau pihak tertentu yang memiliki wewenang.

Lebih lanjut akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek lain seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Sehingga dengan diterapkannya penyelenggaraan organisasi yang akuntabel dapat mewujudkan kinerja yang optimal dari suatu organisasi. Di samping itu, akuntabilitas juga dapat dimaknai dalam konteks cara penyampiannya. Menurut Hulme dan Tunner akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.” (Vikrama, 2017: 3).

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pada organisasi, khususnya pada organisasi pemerintah yang mendapatkan mandat dari masyarakat setempat tersebut, harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang diwakilinya. Wakil rakyat juga harus mampu memahami anggaran, untuk mewujudkan hal ini harus dilakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses transparansi

anggaran. Akuntabilitas tidak hanya dilaksanakan kepada organisasi atau institusi yang secara tingkat atau level berada di atas, namun juga perlu disampaikan kepada organisasi di bawahnya termasuk kepada masyarakat.

Hulme dan Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut: “Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi 1) legitimasi para pembuat kebijakan, 2) keberadaan moral yang memadai, 3) kepekaan, 4) keterbukaan, 5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal, 6) upaya peningkatan efisiensi dan evektifitas.” (Usman, 2017:4).

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2018:181). Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (Sahdan, 2006:13). Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi

(Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3 Dana Desa

a. Definisi Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Rincian Dana Desa

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:20

- 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan cara:

- 1) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) x (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- 2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
- 3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi: (1) Ketersediaan pelayanan dasar; (2) Kondisi infrastruktur; (3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.

c. Mekanisme penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang - Undang Desa meliputi:

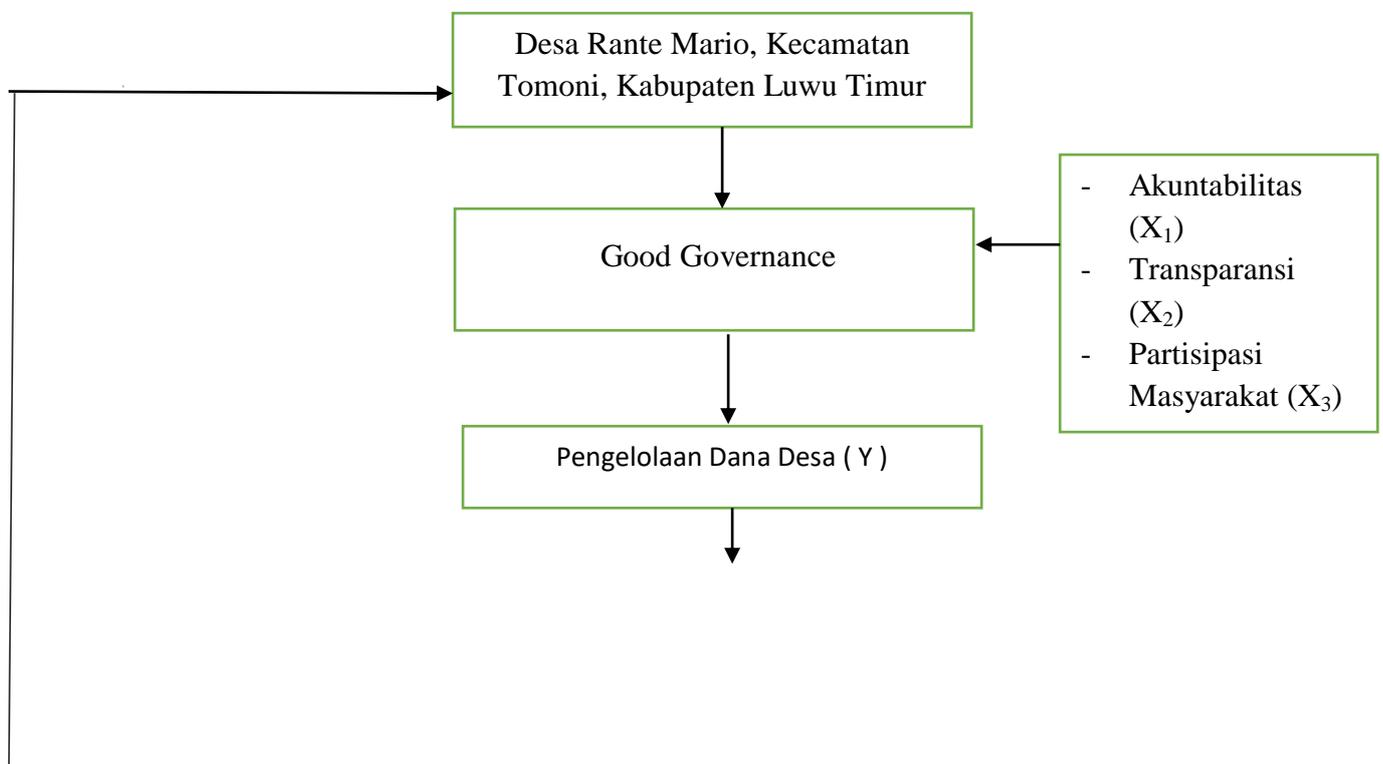
- 1) Penyiapan rencana;
- 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa;
- 3) Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APBDesa;
- 4) Penetapan APBDesa;
- 5) Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola;

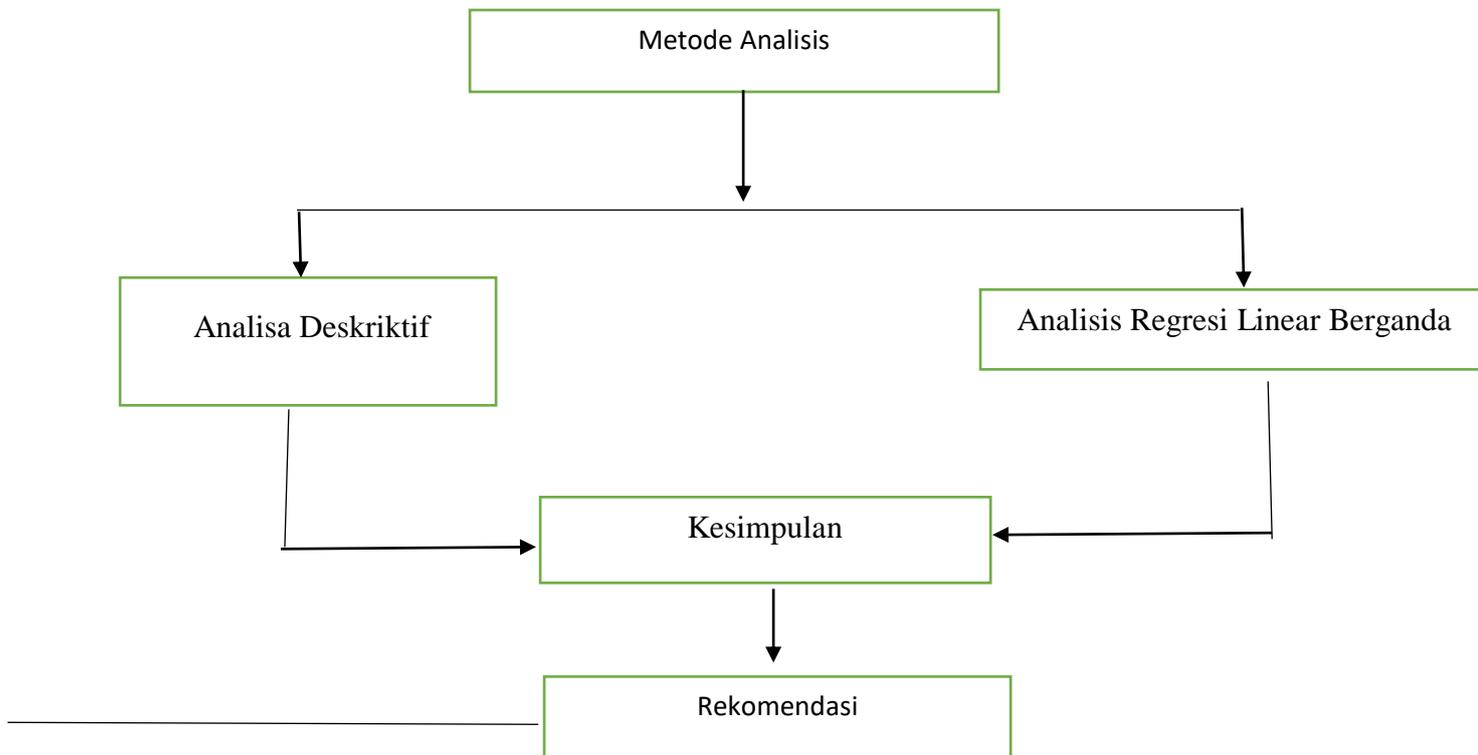
- 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa;
 - 7) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014)
- e. Pelaporan Dana Desa

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa terdiri atas: tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa; tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa sampai dengan tahap II. Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa yang disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.

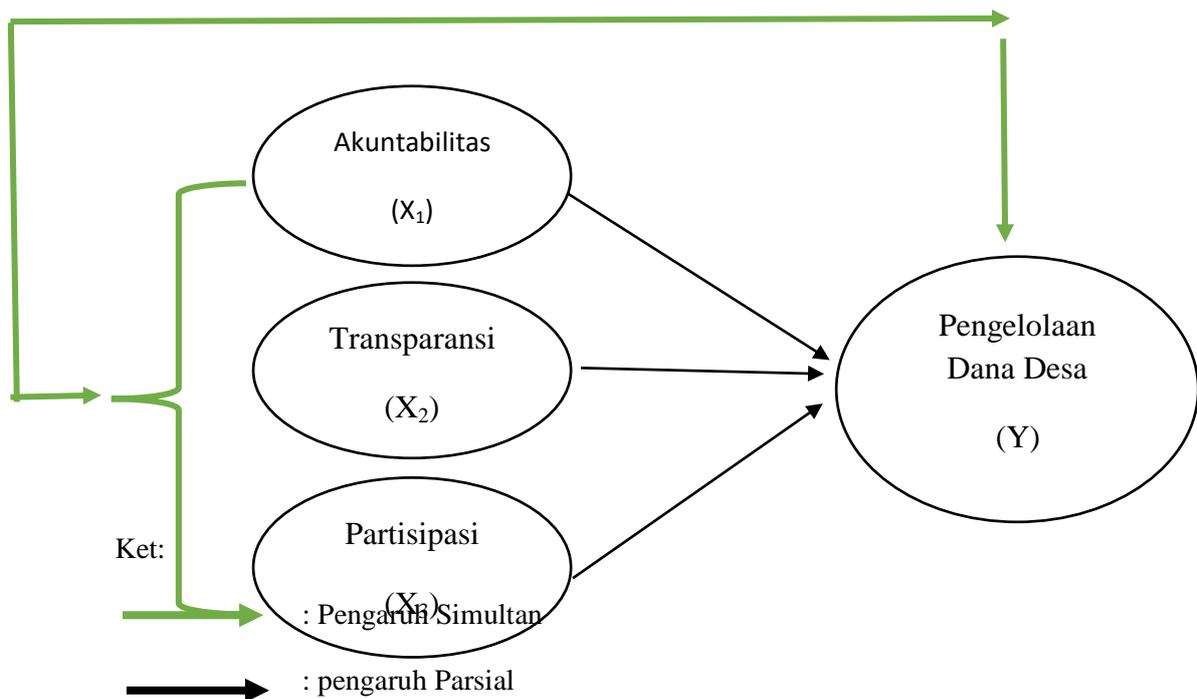
2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari kerangka teori diatas, dapat di digambarkan kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut.





2.1 Kerangka Pikir Model Penelitian



Tabel 2.1 Model Penelitian

VARIABEL	DEFENISI	PROXY
Alokasi Dana Desa	Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam suatu anggaran (Kememtriam Dalam Negeri,2028)	Variabel pengelolaan dana desa diukur dengan indicator yang diadopsi dari (Ultafiah,2017) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1). Tahap perencanaan (2). Tahap pelaksanaan (3). Tahap penatausahaan (4). Tahap pelaporan (5). Tahap pertanggungjawaban
Akuntabilitas	<p>Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan pertanggungjawaban.</p> <p>Penjelasan manajemen organisasi sector publictentang aktivitas program dan kebijakan yang sudah dilakukan beserta sumber daya yang akan di gunakan.</p>	<p>Akuntabilitas diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Akuntabilitas kejujuran dan hukum (2). Akuntabilitas manajerial (3). Akuntabilitas program (4). Akuntabilitas kebijakan (5). Akuntabilitas finansial <p>Transparansi diukur dengan menggunakan 3 indikator</p>

Transparansi	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.	yaitu: (1). Formatif (2). Keterbukaan (3). Pengungkapan
Partisipasi Masyarakat		Adapun indikator pengukuran variable partisipasi masyarakat yaitu: (1). Pengambilan keputusan (2). Pelaksanaan (3). Pengambilan manfaat (4). Evaluasi

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui efek interaksi antara variable akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SPSS 17*. Adapun model regresi secara sistematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a = Kostanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

X₃ = Partisipasi

e = Error term

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, dengan menjabarkan 3 variabel bebas, empat hipotesis pertama diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
2. Diduga transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
3. Diduga partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.
4. Diduga bahwa transparansi paling berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Rante Mario.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan waktu yang di gunakan dalam penelitian ini di perkirakan kurang lebih dari dua bulan lamanya di mulai dari bulan April 2022 sampai Mei 2022

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner/Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dengan tujuan untuk mencari informasi dari suatu masalah. Sasaran dari instrumen kuesioner/angket ini adalah masyarakat di desa Desa Rante Mario. Pengumpulan data melalui kuesioner/angket ini akan dilakukan secara *online* dan *offline*. Kuesioner yang diberikan dalam bentuk *skala likert* setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan diberi bobot atau nilai. Seperti halnya dibawah ini :

Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5

Untuk jawaban Setuju (S) : diberi skor 4

Untuk jawaban Netral (N) : diberi skor 3

Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2

Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan good governance terhadap pengelolaan dana desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan Jenis data kuantitatif dikarenakan topik dalam penelitian memerlukan data yang berupa angka-angka yang diambil dari laporan penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan desa. Pada jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang diperoleh berbentuk informasi, seperti gambaran umum desa dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang didapat serta diolah sendiri oleh peneliti, dimana lewat penyebaran angket dalam memperoleh informasi soal variabel yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dokumentasi terkait subjek yang diteliti dalam hal ini data pegawai Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan aplikasi *SPSS for windows*. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk menginterpretasikan argument responden terhadap pilihan pernyataan dan distribusi frekuensi dari pernyataan responden berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Dalalam penelitian ini, jawaban responden diklasifikasi dalam bentuk jawaban dengan menggunakan skala interval dengan metode analisis regresi linier berganda dimana sebelum melakukan pengujia tersebut dilakuka uji instrumen dan pengujian prasyarat sebagai syarat yang dilakukan dalam pengujia analisis regresi berganda. Berikut persamaan regresi berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pengelolaan dana desa

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparan

X₃ = Partisipasi

e = Erortem

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

Berdasarkan teknik analisis data diatas, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap kualitas instrumen penelitian sebagai berikut.

3.4.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji coba validitas memperlihatkan sejauh mana sesuatu alat ukur itu bisa mengukur apa yang diukur. Validitas merupakan sesuatu dimensi yang membuktikan tingkat-tingkat kevalidan ataupun keabsahan sesuatu instrumen. Instrumen dikatakan valid ataupun sah jika memiliki validitas tinggi. Metode uji yang dipakai merupakan metode hubungan lewat koefisien korelasi product moment.

Angka ordinal dari tiap item persoalan yang dicoba validitasnya dikorelasikan dengan angka ordinal totalitas item, bila koefisien hubungan itu positif, hingga item itu valid atau sah, sebaliknya bila hasilnya negative hingga item yang itu tidak valid serta maka lebih baik dikeluarkan dari angket ataupun digantikan dengan statment koreksi. Berikut rumus metode hubungan product moment:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien validitas item yang dicari dua variabel yang dikorelasikan

r_{xy} = Menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan

X = Skor untuk pernyataan yang dipilih

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum X$ = Jumlah skor dalam distribusi X

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y

Sebagai upaya mendapatkan angka yang signifikan, oleh karena itu dicoba percobaan hubungan dengan menyamakan r hitung dengan r tabel dengan berbantuan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

1. Angka r dibanding dengan angka r tabel dengan $dk = n - 2$ serta derajat signifikansi sebesar 5%.
2. Item statment yang dikaji disebut sah atau valid bila r hitung lebih besar dari r Tabel.
3. Item statment yang dikaji disebut tidak sah atau tidak valid bila r hitung lebih kecil dari r Tabel.

b. Uji Reliabilitas

Realibilitas adalah alat yang digunakan apakah instrumen yang digunakan telah realibel. Hasil riset dikatakan reliabel, apabila ada kecocokan atau persamaan data dalam waktu yang berlainan (Sugiyono, 2017). Percobaan reliabilitas umumnya dipakai dan digunakan buat mengenali seberapa pas dan tepat sebuah alat ukur yang hendak kita maanfaatkan serta gunakan buat mengukur, dalam hal ini misalnya disini buat mengukur aspek kognitif. Pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang angka antara 1-5 memakai rumus Cronbach' s Alpha, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir pertanyaan

σ_1^2 = Varians total

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk mencoba apakah informasi yang didapat melalui angket mempunyai sebaran data yang wajar. Dalam pengesanan atau pengujian ini, yang dilakukan atau dicoba oleh penulis buat menciptakan mutu dan kualitas dari data yang diteliti, dalam menguji kenormalan data maka menggunakan metode *Kolmogrov- Smirnov Test*.

Hasil analisa jika melaporkan informasi berdistribusi wajar bila *Asymp. Sig* < 0, 05. Kebalikannya bila angka *Asymp. Sig* > 0,05 sehingga dapat dikatakan informasi tidak berdistribusi wajar (Ghozali, 2011). Percobaan normalitas tiap- tiap variable bisa dihitung dengan tata cara non parametric ialah dengan tata cara *Kolmogorove Smirnov*. Adapaun patokan dari penetapan data normal bagi Ghozali (2011) adalah:

- 1) H_0 diterima = Bila angka (*Sig*) > 0, 05 (Data populasi terdistribudi wajar)
- 2) H_a ditolak = Bila angka (*Sig*) < 0, 05 (Data populasi tidak terdistribusi wajar)

Tidak hanya itu, pembuktian apakah sesuatu data mempunyai penyaluran informasi yang wajar bisa diamati pada wujud penyaluran informasinya pada histogram. Informasi dibidang terdistribusi secara wajar bila data tersebut berbentuk seperti lonceng. Sebaliknya disebut data berdistribusi wajar jika menggunakan standar probability alur, data

penelitian dibidang wajar bila terdapat penyebaran titik- titik disekitar garis diagonal serta penyebarannya menjajaki arah garis diagonal. Bila informasi menabur disekitar garis wajar serta menjajaki arah garis wajar berarti bentuk regresi memenuhi anggapan normalitas (Ghozali, 2011).

b. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji linear atau tidaknya data yang dianalisis (Budi, Darma, 2021).

3.5 . Definisi Operasional

a. Good Governance (x)

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengukuran variabel Good Governance berdasarkan indikatornya. Indikator dari Good Governance:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam 26 pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar - benar dilaporkan dan diper tanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2) Transparansi

Transparansi merupakan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

3) Partisipasi

Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program - program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (y)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

- 1) Alokasi Sumber Daya
- 2) Operasional Kegiatan

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penyampaian kepada dosen pembimbing												
2.	Persiapan												
3.	Usulan penelitian dan konsultasi												
4.	Seminar usulan penelitian												
5.	Pengumpulan/melengkapi data												
6.	Penulisan BAB II dan Konsultasi												
7.	Penulisan BAB III dan Konsultasi												
8.	Ujian Proposal Penelitian												
9	Penelitian												
9	Penulisan BAB IV dan BAB V												
10.	Konsultasi												
11.	Ujian Skripsi												

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Rante Mario

Awal mula Desa Rante Mario terbentuk adalah hasil pemekaran dari Desa Kalpataru yang diketuai oleh Bapak Alm. Bara“R sebagai pejabat sementara (PJS) selama satu tahun tiga bulan dan diresmikan pada tanggal 2 Mei 2012. Pada tahun 2013 Desa Rante Mario dijadikan desa deventip dan diadakan pemilihan kepala desa, pada saat pemilihan ada tiga calon kepala desa yang mencalonkan diri yaitu: Bapak Alm. Bara“R, Bapak Syarifuddin. S dan Bapak Alexander Rambu Tiku Langi. Dan dimenangkan oleh Bapak Syarifuddin. S dan dilantik pada tanggal 3 Agustus 2013 sebagai kepala Desa Rante Mario periode 2013-2019. Desa Rante Mario merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Desa Rante Mario memiliki tiga Dusun diantaranya yaitu: Dusun Marampa, Dusun Mandiri dan Dusun Tengko Situru. Wilayah Desa Rante Mario sendiri terletak di bagian selatan berbatasan dengan Desa Kalpataru, sebelah utara berbatasan dengan sungai Tomoni, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalpataru dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ujung Baru. Masyarakat Desa Rante Mario sendiri adalah masyarakat yang mejemuk, yakni terdiri dari beberapa suku diantaranya Suku Toraja, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Batak dan Suku Pamona Berikut ini adalah gambaran sejarah singkat tentang Desa Rante Mario: 2011- 2012 Desa Rante Mario merupakanpecahan dari Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni,

Kabupaten Luwu Timur, yang pada waktu itu masih dalam pimpinan Bapak A.R Salim, Sos., selaku Camat Tomoni pada saat itu Bapak Mukhtar menjabat sebagai kepala Desa Kalpataru mengusulkan agar Desa Kalpataru di pecah menjadi dua dan usulannya pun diterima sehingga masyarakat setempat memilih Bapak Alm. Bara`r menjadi pemimpin Desa Rante Mario sebagai pejabat sementara (PJS) selama satu tahun tiga bulan.

2013-2019, pada awal tahun diadakan pemilihan Kepala Desa Rante Mario yang diikuti oleh tiga orang calon dan dimenangkan oleh Bapak Syarifuddin S. dan dilantik pada tanggal 3 Agustus 2013 dengan masa jabatan 2013-2019 dikarenakan telah memenangkan pilkades dan untuk sekarang kepala desa yang sekarang menjabat adalah Bapak Roni Pattinama, S. Sos.

4.1.2 Keadaan Umum Desa Rante Mario

1. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Rante Mario berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalpataru.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Alam dan Desa Asana Kecamatan Wotu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Baru.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rante Mario berdasarkan catatan desa pada tahun 2021 adalah 1.583 jiwa yang terdiri dari 856 laki-laki dan 727 perempuan dengan 421 kepala keluarga.

2. Luas Wilayah

Desa Rante Mario merupakan salah satu desa di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 6.250 m² yang terbagi dari 3 dusun yaitu Dusun Marampa, Dusun Mandiri dan Dusun Tengko Situru.

3. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Rante Mario adalah petani kakao, cengkeh, merica dan sawit, hal ini didukung dengan topografi wilayah Desa Rante Mario adalah dataran rendah dan pegunungan yang cocok ditanami tanaman kakao, cengkeh dan sawit.

4.1.3 Visi dan Misi Desa

1. Visi

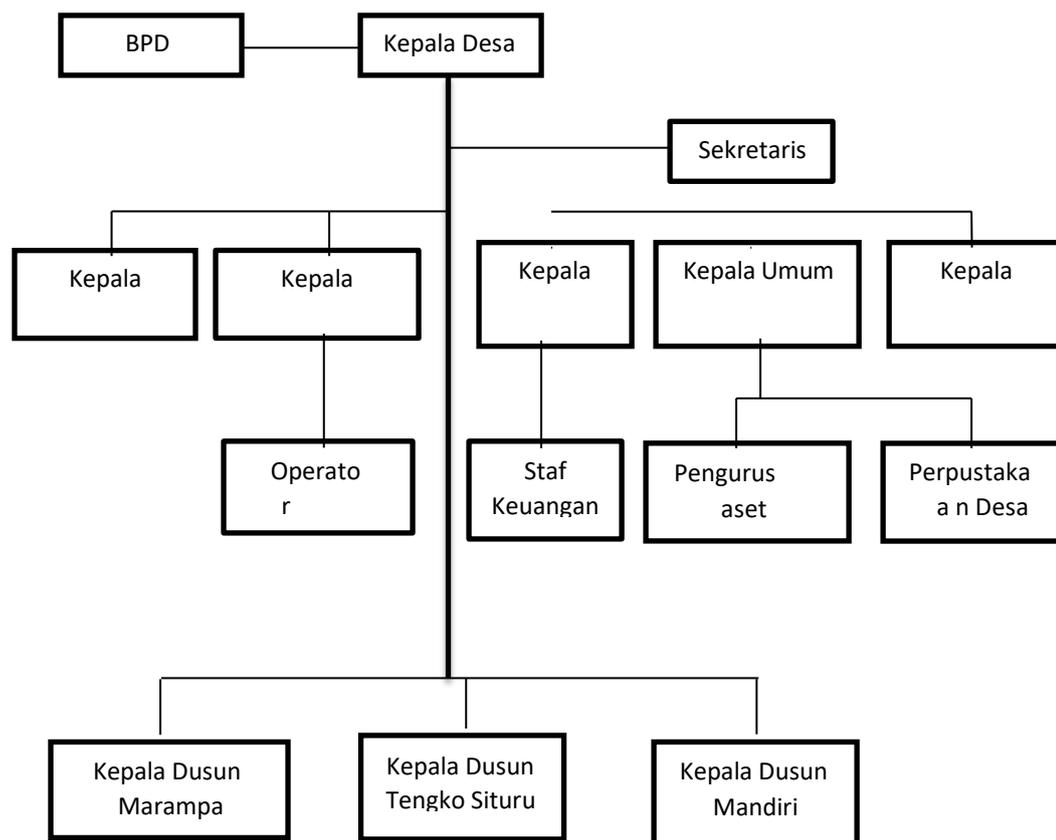
Terbangunnya pemerintahan desa yang lebih baik, guna mewujudkan desa rante Mario yang aman, adil dan sejahte

2. Misi

- a. Memelihara dan membina kerukunan beragama.
- b. Menciptakan pemerintah yang lebih demokratis dan transparan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan untuk mencapai taraf ekonomi masyarakat yang lebih baik.

- d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- e. Mengedepankan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di desa.
- g. Memfasilitasi pemekaran dusun di dusun marampa.
- h. Memeudahkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
- i. Meingkatkan sumber daya masyarakat (SDM) dan pengelolaan sumber daya alam.

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Rante Mario



Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Mario

4.2 Analisis Karakteristik Responden

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Data Responden Masyarakat Desa Rante Mario Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
23 - 28 tahun	14	31,11
29 - 36 tahun	13	28,88
37 - 43 tahun	10	22,22
44 - 50 tahun	8	17,77
Total	45	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 5 Hasil data responden masyarakat Desa Rabnte Mario berdasarkan usia, hasil tertinggi diperoleh pada rentan usia 23 - 28 tahun yang berjumlah 14 orang atau 31,11 % responden. Rentan usia 29 - 36 tahun berjumlah 13 orang atau 28,88 responden, 37-43 tahun berjumlah 10 orang atau 22,22 responden, 44 - 50 tahun berjumlah 8 orang atau 17,77 % responden.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di sajikan pada table di bawah ini :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	23	51,11 %
Perempuan	22	48,88 %
Total	45	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin masyarakat Desa Rabnte Mario yang menjadi responden yang paling menunjukkan mayoritas laki-laki, yaitu sebanyak 23 orang (51.11 %), sedangkan sisanya adalah pengunjung laki-laki sebanyak 22 orang (48.88 %).

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden	Persentase
SMP	15	33,3 %
SMA	30	66,6 %
Total	45	100%

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rante Mario yang diambil sebagai responden yaitu yang berpendidikan SMP sebanyak 15 orang (33,3 %) dan pendidikan SMA sebanyak 30 orang (66,6 %), Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rabnte Mario yang menjadi responden terbanyak adalah pada pendidikan SMA yaitu 30 orang (66,6 %).

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Validitas

Untuk mengetahui valid atau sahnya variabel penelitian maka digunakan uji validitas. untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu item yang diuji. Uji validitas memiliki standar kolerasi yan ditentukan dari besar responden yang digunakan dengan menggunakan rumus:

$$Df=n-2$$

$$n =45-2$$

$$n=43 \text{ reponden}$$

Jumlah 45 responden yang akan dianalisis maka besar R tabel yang digunakan ialah 0,361. Untuk mengetahui apakah kuisisioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Corrected item total correlation	R Tabel n=43 taraf 5%	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X11	0,475	0,294	Valid
	X12	0,411	0,294	Valid
	X13	0,454	0,294	Valid
	X14	0,577	0,294	Valid
	X15	0,569	0,294	Valid
Transparan (X2)	X21	0,423	0,294	Valid
	X22	0,427	0,294	Valid
	X23	0,422	0,294	Valid
	X24	0,470	0,294	Valid
	X25	0,620	0,294	Valid
Partisipasi (X3)	X31	0,685	0,294	Valid
	X32	0,576	0,294	Valid
	X33	0,517	0,294	Valid
	X34	0,673	0,294	Valid
	X35	0,674	0,294	Valid
	Y1	0,449	0,294	Valid

Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y2	0,579	0,294	Valid
	Y3	0,529	0,294	Valid
	Y4	0,365	0,294	Valid
	Y5	0,542	0,294	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS *Versi 25 tahun 2022*

Berdasarkan hasil uji validitas memperlihatkan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memiliki r tabel lebih besar atau di atas 0,294 Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien yang digunakan tentang variabel pengetahuan dan Minat dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Setelah didapat reliabilitas Instrumen (r -hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan r -tabel yang sesuai dengan jumlah responden dan taraf nyata. Bila r -hitung $>$ r -tabel, maka instrument tersebut dikatakan *reliable*. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach yaitu sebesar 0,60. Jika nilai r -hitung $>$ dari 0,60 maka item tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,777	0.60	Reliabel
2.	Transaparansi	0,677	0.60	Reliabel
3	Partisipasi	0,631	0.60	Reliabel
4	Pengelolaan Dana Desa	0,693	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 25 tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan angka-angka dari nilai *cronbachs Alpha(a)* pada seluruh variable dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran di atas nilai 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indenpenden dan dependen adalah *reliable* dan dapat di simpulkan bahwa pernyataan koesioner responden menunjukkan kehandalan dalam mengukur variable-variabel dalam model penelitian.

4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data tersebut berdistribusi nirmal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya data yang dianalisis berdistribusi normal maka sebaliknya jika data nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,73479021
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,049
	Negative	-,046
Test Statistic		,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel tersebut maka diketahui bahwa nilai sig 0,200 > 0,05. hal ini berarti bahwa seluruh data yang digunakan saling berdistribusi normal, maka dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

4.3.4 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.7
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,724	2,425		1,536	,132
	Akuntabilitas	,328	,116	,359	2,838	,007
	Transparansi	,288	,104	,301	2,769	,008
	Partisipasi	,274	,099	,328	2,773	,008

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 25

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 3,724 + 0,328 (X_1) + 0,288 (X_2) + 0,274 (X_3)$$

Keterangan:

Y = Variabel terkait (Pengelolaan Dana Desa)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Variabel bebas (Akuntabilitas)

X_2 = Variabel bebas (Transaparansi)

X_3 = Vairabel Bebas (Partisipasi)

e = Standar eror

- a. Koefisien sebesar 3,724 mengandung arti bahwa nilai konstan variabel Pengelolaan Dana Desa adalah 3,724
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,328 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan Akuntabilitas, maka nilai Pengelolaan dana desa bertambah sebesar 0,328
- c. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,288 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan Transaparansi, maka nilai Pengelolaan dana desa bertambah sebesar 0,288
- d. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,254 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan Total Asset TurnovPartisipasi, maka nilai Pengelolaan dana Desa bertambah sebesar 0,254.
- e. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka dapat diketahui faktor yang paling mempengaruhi Pengelolan Dana Desa adalah variabel akuntabilitas dengan peningkatan 1 % akuntabilitas maka akan meningkatkan pengelolaan dana Desa Sebesar 0,328.

4.3.5 Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai berkisaran antara $0 \leq R^2 \leq 1$.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,782 ^a	,612	,583	,761

a. Predictors: (Constant), Partisipasi , Transparansi , Akuntabilitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 25 tahun 2022

Berdasarkan tabel , analisis data menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2 Square) sebesar 0,612 atau 61,2 %. Arti dari koefisien ini adalah pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sedangkan sisanya 38,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3.6 Pengujian Hiptosis (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. (t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima jika nilai t hitung $< t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$
- H_a ditolak jika nilai t hitung $> t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Tabel 4.9
Uji Parsial T

Variabel	T Hitung	Sig
Akuntabilitas (X1)	3,677	0,007
Transparansi (X2)	2,192	0,008
Partisipasi (X3)	3,100	0,008

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 25 tahun 2022

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (0,05/2 : n - k - 1) \\
 &= (0,05/2 : 45-1-1) \\
 &= (0,025 : 43) \text{ Dilihat pada distribusi nilai } t_{\text{tabel}} = 2,016
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas maka dapat disusun, diantaranya :

- a. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel Akuntabilitas (X1) sebesar $2,838 \geq t_{\text{tabel}} 2,016$ dan nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.
- b. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel Transparansi (X2) sebesar $2,769 \geq t_{\text{tabel}} 2,016$ dan nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.
- c. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel Partisipasi (X3) sebesar $3,773 \geq t_{\text{tabel}} 2,016$ dan nilai signifikan

sebesar $0,008 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hal ini dikarenakan pemerintah desa di Desa Rante Mario telah benar-benar melaporkan dan mempertanggungjawabkan penganggaran alokasi dana desa kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garung (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”. menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

4.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip transparansi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah maksimal menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu serta diumumkan secara terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” hasil penelitian menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

4.4.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip partisipasi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat Desa Rante Mario kurang ikut serta dalam memberikan masukan kepada aparat desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ultafiah (2017) yang menyatakan bahwa prinsip partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil uji parsial, disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana.

4.4.4 Analisis tingkat pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Parsipasi terhadap Pengelolaan Desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam menguji secara bersama-sama antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Hasil juga menjawab hipotesis yang telah rumuskan sebelumnya bahwa ketiga variabel memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga variabel yang paling mempengaruhi maka diketahui bahwa variabel akuntabilitas merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Akuntabilitas merupakan hal yang paling mempengaruhi pengelolaan dana desa dikarenakan dengan pendekatan akuntabilitas maka pemerintah desa menjunjung nilai integritas, kejujuran tanggung jawab serta pengelolaan sistem yang terstruktur sehingga pengelolaan dan desa dapat berjalan dengan baik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data statistik SPSS 25 terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa proses penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan di desa Rante Mario
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah telah memaksimalkan menyediakan informasi cukup, benar, akurat dan tepat waktu serta diumumkan secara terbuka.
3. Variabel partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Rante Mario baik dalam memberikan masukan kepada aparat desa dan terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa.
4. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap pengelolaan dana desa adalah variabel akuntabilitas.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka adapu saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi aparatur desa sebaiknya meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
2. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih ikut berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBDes dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh.. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan penambahan variabel dan diharapkan agar dapat menambah referensi

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2018. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu
- Atiq, F. 2018. Kampusnesia. Dipetik 13 Februari 2022, dari Kampusnesia: <https://kampusnesia.com/2018/03/12/pemkab-demak-alokasikan-dana-desa-2018-senilai-rp2295-miliar/>
- Budi, Darma. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*, Jakarta: GUEPEDIA
- Duadji, N. (2013). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(3), 197–203.
- Dwiyanto Agus. 2017. *Menuju good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta Gadj Mada University Press. Hal. 189
- Finta Munti & Heru Fahlevi. 2017. *Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegor
- Hasan, M. (2019) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- Kurrohman, Taufik. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jember: Universitas Jember*.
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negerin Surakarta. Hal 20
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1)
- Rustiarini, Ni Wayan. 2016. "Pengaruh Corporate Governace Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan". Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 13-14 Oktober.
- Sahdan. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Soleh, Ahmad. 2016. Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Ekombis Review, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen, Bengkulu
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tarjono Astha Nugraha. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Desentralisasi Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Analisis Pada Pemerintah Kabupaten Pematang. Media Ekonomi dan Manajemen, Vol 30, No 1 (2015)
- Tumbel, Satria M. 2015 "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." Politico: Jurnal Ilmu Politik, vol. 6, no. 1
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM di Kantor Satlantas Polerestabes Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik. Vol 2 No 2.
- Vikrama, A. A. (2017). Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi Bmd pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Citizen Charter, 2(2)
- Wirawan. 2015. Evaluasi kinerja sumber daya manusia. Jakarta : Salemba Empat
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. 2014. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Page: 120-138.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Surat Izin Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
DESA RANTE MARIO**

Alamat : Jalan Rante Mario No. :Kode Pos 92972

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 422/456/DRM/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI PATTINAMA, SE
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan :

Nama : MASNI
Nim : 4518012122
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul skripsi : Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian sdi Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, dengan judul : **Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rante Mario
Pada Tanggal 12 Juli 2022
Kepala Desa Rante Mario


RONI PATTINAMA, SE



Lampiran 2: Kuisisioner

Kuisisioner Penelitian

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti dan seksama!
2. Jawab pernyataan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Desa Wewangriu.
3. Berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang menurut anda tepat sesuai dengan keadaan riil yang terjadi, dengan keterangan

SB: Sangat Baik (Skor 5)

B : Baik (Skor 4)

KB: Kurang Baik (Skor 3)

TB: Tidak Baik (Skor 2)

STB: Sangat Tidak Baik (Skor 1)

Akuntabilitas						
No.	Pernyataan	SB	B	KB	TB	STB
1.	Pemerintah desa menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggung jawab masing - masing yang selaras dengan tujuan pemerintah desa.					
2.	Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara jujur terutama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
3.	Pemerintah Desa menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.					
4.	Pemerintah Desa Bertanggung jawab atas Program dan Aliran dana yang dikeluarkan					
5.	Program-program dan anggaran desa dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output yang maksimal					
Transparansi						
1.	Pemerintah desa menyediakan informasi proses pengelolaan alokasi dana desa untuk masyarakat di desa.					
2.	Pemerintah desa mengumumkan secara terbuka proses pengelolaan alokasi dana desa agar pihak kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya.					

3.	Kelengkapan penyediaan informasi pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.					
4	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengolahan dana Desa keuangan mudah didapatkan					
5	Adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan informasi					
Partisipasi						
1.	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program - program desa.					
2.	Masyarakat desa memberikan masukan kepada aparat pemerintah desa.					
3.	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa.					
4.	Masyarakat merasa memiliki dan turut mememantau alokasi pengelolaan dana Desa					
5.	Masyarakat dan Pemerintah Desa berkolaborasi dalam menjalankan program serta mengatur alokasi dana					
Pengelolaan Alokasi Dana Desa						
1.	Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa.					
2.	Pemerintah desa berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa.					

3.	Pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.					
4.	Dalam penyusunan anggaran dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku					
5.	Pengumuman tentang dana desa bisa didapatkan setiap waktu					

Lampiran 3: Dokumentasi









Lampiran 4: Tabulasi Data

AKUNTABILITAS (X1)					
X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
4	3	4	3	5	19
4	4	5	4	4	21
3	3	4	3	4	17
4	4	5	4	5	22
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	5	23
4	5	3	5	4	21
4	5	5	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	5	4	5	4	22
3	3	3	3	3	15
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
5	4	3	4	5	21
2	3	3	3	2	13
4	4	3	4	4	19
3	5	2	5	3	18
5	3	4	3	5	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15

5	2	4	2	5	18
3	4	3	4	3	17
4	3	3	3	4	17
3	3	4	3	3	16
4	4	3	4	4	19
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	3	16
3	3	5	3	3	17
3	3	4	3	3	16
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	3	4	3	5	20
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	5	3	5	4	21
4	4	5	4	4	21
3	3	5	3	3	17
5	4	3	4	5	21
3	3	4	3	3	16

TRANSPARANSI (X2)					
X21	X22	X23	X24	X25	TOTAL
5	4	3	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	4	3	4	4	20
5	4	4	3	4	20
5	5	4	5	4	23
5	3	4	5	5	22
4	3	3	4	4	18
4	4	3	4	4	19
3	4	4	3	4	18
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	3	5	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	5	4	3	3	18
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	3	4	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	3	16

3	4	4	3	3	17
4	4	3	4	4	19
4	4	3	4	4	19
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	3	16
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
3	3	4	3	3	16
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	3	4	5	5	22
4	4	3	4	4	19
3	3	5	3	3	17
4	4	5	4	3	20
4	4	5	4	4	21
5	5	4	5	4	23

PARTISIPASI (X3)					
X31	X32	X33	X34	X35	TOTAL
5	4	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	4	21
3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	5	21
3	3	3	3	4	16
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	5	21
3	3	3	3	4	16
5	3	5	5	5	23
5	4	5	5	3	22
3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	3	19
5	5	4	5	4	23
3	4	5	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	3	3	21

4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	5	21
3	5	3	3	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	5	17
4	4	4	4	4	20
5	3	5	3	3	19
4	4	4	4	4	20
3	4	3	3	5	18
3	5	5	3	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	5	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	4	24
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	5	21

PARTISIPASI MASYARAKAT (Y)					
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL
5	5	5	4	5	24
4	4	5	5	5	23
4	4	5	4	4	21
5	4	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	22
5	3	5	5	5	23
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
5	4	5	3	5	22
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	5	22
3	4	5	5	5	22
4	5	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
5	3	5	4	5	22

4	5	5	5	4	23
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	4	23
5	3	5	4	3	20
5	4	5	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22
5	4	5	5	5	24
4	5	5	5	5	24
5	4	5	5	5	24
3	4	5	5	4	21
4	5	4	4	4	21
5	4	4	4	4	21
4	4	4	5	5	22
4	4	5	5	4	22
5	5	5	4	5	24
5	5	5	4	4	23
5	5	5	3	4	22
5	5	4	5	5	24
5	4	4	5	5	23

Lampiran 5: Hasil Uji SPSS

HASIL UJI SPSS

A. Uji Validitas

1. Akuntabilitas X1

		Correlations					
		X11	X12	X13	X14	X15	Akuntabilitas
X11	Pearson	1	-,303 [*]	-,144	,041	,048	,275
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,043	,344	,787	,753	,068
	N	45	45	45	45	45	45
X12	Pearson	-,303 [*]	1	-,065	,294 [*]	,067	,411 ^{**}
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,043		,673	,050	,662	,005
	N	45	45	45	45	45	45
X13	Pearson	-,144	-,065	1	-,083	,165	,454 ^{**}
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,344	,673		,589	,279	,002
	N	45	45	45	45	45	45
X14	Pearson	,041	,294 [*]	-,083	1	,115	,577 ^{**}
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,787	,050	,589		,451	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X15	Pearson	,048	,067	,165	,115	1	,569 ^{**}
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,753	,662	,279	,451		,000
	N	45	45	45	45	45	45
Akuntabilitas	Pearson	,275	,411 ^{**}	,454 ^{**}	,577 ^{**}	,569 ^{**}	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,068	,005	,002	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Transparansi (X2)

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X25	Transparansi
X21	Pearson Correlation	1	-,186	-,434**	,218	,110	,280
	Sig. (2-tailed)		,220	,003	,151	,473	,062
	N	45	45	45	45	45	45
X22	Pearson Correlation	-,186	1	,119	-,083	,018	,427**
	Sig. (2-tailed)	,220		,438	,588	,909	,003
	N	45	45	45	45	45	45
X23	Pearson Correlation	-,434**	,119	1	-,119	,278	,442**
	Sig. (2-tailed)	,003	,438		,436	,065	,002
	N	45	45	45	45	45	45
X24	Pearson Correlation	,218	-,083	-,119	1	-,118	,370*
	Sig. (2-tailed)	,151	,588	,436		,438	,012
	N	45	45	45	45	45	45
X25	Pearson Correlation	,110	,018	,278	-,118	1	,620**
	Sig. (2-tailed)	,473	,909	,065	,438		,000
	N	45	45	45	45	45	45
Transparansi	Pearson Correlation	,280	,427**	,442**	,370*	,620**	1
	Sig. (2-tailed)	,062	,003	,002	,012	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Partisipasi

Correlations

		X31	X32	X33	X34	X35	Partisipasi
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

X31	Pearson Correlation	1	-,011	,427**	,365*	-,250	,685**
	Sig. (2-tailed)		,941	,003	,014	,098	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X32	Pearson Correlation	-,011	1	-,126	,056	-,194	,275
	Sig. (2-tailed)	,941		,411	,715	,202	,067
	N	45	45	45	45	45	45
X33	Pearson Correlation	,427**	-,126	1	,071	-,183	,517**
	Sig. (2-tailed)	,003	,411		,644	,229	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X34	Pearson Correlation	,365*	,056	,071	1	,052	,673**
	Sig. (2-tailed)	,014	,715	,644		,734	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X35	Pearson Correlation	-,250	-,194	-,183	,052	1	,174
	Sig. (2-tailed)	,098	,202	,229	,734		,252
	N	45	45	45	45	45	45
Partisipasi	Pearson Correlation	,685**	,275	,517**	,673**	,174	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,067	,000	,000	,252	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Pengelolaan Dana Desa

		Correlations					Pengelolaan Dana Desa
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
Y1	Pearson Correlation	1	-,030	,096	-,150	,008	,449**
	Sig. (2-tailed)		,847	,531	,325	,958	,002
	N	45	45	45	45	45	45

Y2	Pearson Correlation	-,030	1	-,116	,103	,203	,579**
	Sig. (2-tailed)	,847		,450	,500	,181	,000
	N	45	45	45	45	45	45
Y3	Pearson Correlation	,096	-,116	1	-,206	-,021	,229
	Sig. (2-tailed)	,531	,450		,175	,890	,131
	N	45	45	45	45	45	45
Y4	Pearson Correlation	-,150	,103	-,206	1	-,009	,365*
	Sig. (2-tailed)	,325	,500	,175		,955	,014
	N	45	45	45	45	45	45
Y5	Pearson Correlation	,008	,203	-,021	-,009	1	,542**
	Sig. (2-tailed)	,958	,181	,890	,955		,000
	N	45	45	45	45	45	45
Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	,449**	,579**	,229	,365*	,542**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,131	,014	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. UJI RELIABILITAS

1. Akuntabilitas (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,377	6

2. Transparansi (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,577	6

3. Partisipasi (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,631	6

4. Pengelolaan Dana Desa

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,593	6

C. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,73479021
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,049
	Negative	-,046
Test Statistic		,049

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

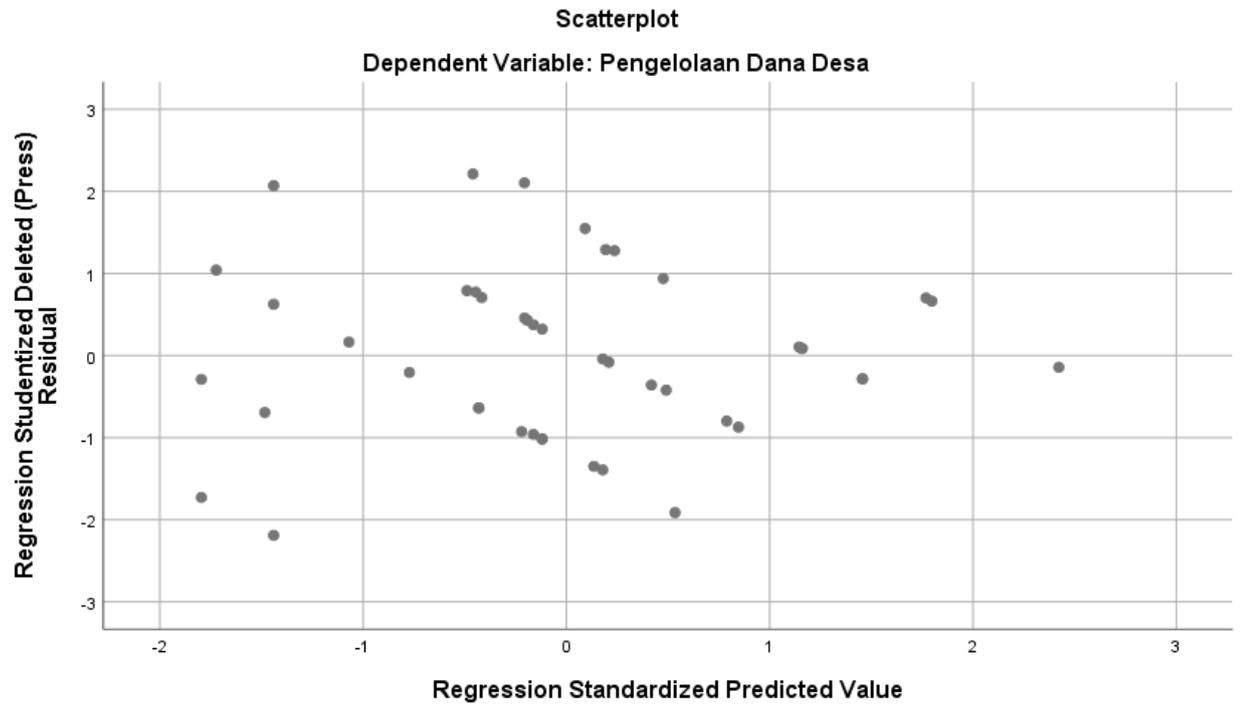
- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

D. Uji Linearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3,724	2,425		1,536	,132		
	Akuntabilitas	,328	,116	,359	2,838	,007	,593	1,687
	Transparansi	,288	,104	,301	2,769	,008	,801	1,248
	Partisipasi	,274	,099	,328	2,773	,008	,678	1,475

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

E. Uji Heteroskedastisitas



F. Uji Regresi Berganda

Regression

Notes		
Output Created		19-JUL-2022 10:35:33
Comments		
Input	Data	D:\SKRIPSI MASN\TABULASI DATA_MASNI.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	45
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT TOTAL_Y /METHOD=ENTER TOTAL_X1 TOTAL_X2 TOTAL_X3.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,17
	Memory Required	4256 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi , Transparansi , Akuntabilitas ^b		Enter

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,782 ^a	,612	,583	,761

a. Predictors: (Constant), Partisipasi , Transparansi , Akuntabilitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37,444	3	12,481	21,541	,000 ^b
	Residual	23,756	41	,579		
	Total	61,200	44			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi , Transparansi , Akuntabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,724	2,425		1,536	,132
	Akuntabilitas	,328	,116	,359	2,838	,007
	Transparansi	,288	,104	,301	2,769	,008
	Partisipasi	,274	,099	,328	2,773	,008

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa